



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2025

Valentin Romualda Gaudiosa Bella Adur<sup>1\*</sup>, Eugenius Besli<sup>2</sup>, Yesita Madona Vikmart Mada Hekopung<sup>3</sup>, Rikardus Gonzales Wea Libu<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Sikka, Indonesia, [bellavalentin93@gmail.com](mailto:bellavalentin93@gmail.com)

<sup>2</sup>Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Sikka, Indonesia, [egibesli96@gmail.com](mailto:egibesli96@gmail.com)

<sup>3</sup>Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Sikka, Indonesia, [yesitamadona@gmail.com](mailto:yesitamadona@gmail.com)

<sup>4</sup>Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Sikka, Indonesia, [gonzalesrikardus0921@gmail.com](mailto:gonzalesrikardus0921@gmail.com)

\*Corresponding Author: [bellavalentin93@gmail.com](mailto:bellavalentin93@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze the influence of employee expenditures on total regional expenditures in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of East Nusa Tenggara Province for the 2016-2025 period. The study employed a quantitative approach with descriptive and associative methods. The data used were secondary data obtained from APBD reports and published regional financial statistics. The analysis techniques employed included descriptive statistics and simple linear regression analysis. The results showed that employee expenditures and total regional expenditures fluctuated from year to year during the study period. The regression analysis indicated that employee expenditures had a positive and significant influence on regional expenditures. The coefficient of determination ( $R^2$ ) of 0.999 indicated that most of the variation in total regional expenditures can be explained by employee expenditures. The t-test also showed a significance value less than 0.05, thus accepting the research hypothesis. Thus, employee expenditures are a significant factor influencing total regional expenditures in the East Nusa Tenggara Provincial APBD.*

**Keywords:** *Employee Expenditures, Regional Expenditures, APBD, Regional Fiance*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pegawai terhadap total belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2016-2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan APBD dan publikasi statistik keuangan daerah. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pegawai dan total belanja daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun selama periode penelitian. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap total belanja daerah. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,999 menunjukkan bahwa sebagian besar variasi total belanja daerah dapat dijelaskan oleh belanja pegawai. Hasil uji t juga menunjukkan nilai signifikansi 0,00

lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis penelitian diterima. Dengan demikian, belanja pegawai merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi besarnya total belanja daerah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Kata Kunci:** Belanja Pegawai, Belanja Daerah, APBD, Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta keuangan daerah secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam struktur APBD, belanja daerah merupakan komponen penting yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja daerah terdiri dari beberapa komponen, salah satunya adalah belanja pegawai. Belanja pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, serta berbagai hak keuangan aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah. Keberadaan belanja pegawai sangat penting karena berkaitan langsung dengan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya belanja pegawai sering kali mengambil porsi yang cukup besar dalam struktur belanja daerah. Tingginya alokasi belanja pegawai dapat mempengaruhi komposisi belanja daerah secara keseluruhan, terutama dalam pengalokasian anggaran untuk sektor pembangunan seperti belanja modal dan program pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai yang proporsional menjadi hal penting agar pemerintah daerah tetap mampu menjalankan fungsi pembangunan secara optimal.

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, sehingga pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan efisien sangat diperlukan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan belanja pegawai pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan aparatur dan kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan pegawai. Kondisi ini dapat memberikan pengaruh terhadap total belanja daerah yang dialokasikan setiap tahun.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk melakukan analisis mengenai pengaruh belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pegawai terhadap total belanja daerah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2016-2025. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran belanja pegawai dalam struktur belanja daerah serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja pegawai terhadap total belanja daerah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2016-2025.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel belanja pegawai dan total belanja daerah menggunakan data numerik yang diperoleh dari dokumen anggaran pemerintah daerah.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan belanja pegawai dan total belanja daerah selama periode penelitian, sedangkan metode asosiatif digunakan

untuk menganalisis pengaruh belanja pegawai terhadap total belanja daerah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti laporan APBD, laporan realisasi anggaran, dan publikasi statistik keuangan daerah.

b. StudiKepustakaan

Mengkaji literatur yang berkaitan dengan keuangan daerah, belanja pemerintah, dan pengelolaan APBD.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2025, belanja pegawai menunjukkan kecenderungan perubahan dari tahun ke tahun yang juga diikuti oleh perubahan pada total belanja daerah. Secara umum, belanja pegawai merupakan salah satu komponen utama dalam struktur belanja daerah karena digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan berbagai hak keuangan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.

Jika dilihat dari perkembangannya, pada periode awal penelitian yaitu tahun 2016-2018, belanja pegawai berada pada tingkat yang relatif stabil meskipun mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2016 belanja pegawai tercatat sebesar 8958,11 dan kemudian menurun menjadi 8730,39 pada tahun 2017 serta 8639,23 pada tahun 2018. Meskipun terjadi penurunan pada belanja pegawai, total belanja daerah justru mengalami peningkatan dari 24103,87 pada tahun 2016 menjadi 26052,58 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut peningkatan total belanja daerah tidak hanya dipengaruhi oleh belanja pegawai, tetapi juga oleh komponen belanja lainnya seperti belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pada periode berikutnya yaitu tahun 2019-2022, belanja pegawai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pembiayaan aparatur serta penyesuaian kebijakan penggajian dan tunjangan pegawai. Pada periode yang sama, total belanja daerah juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja pegawai memiliki keterkaitan yang kuat dengan peningkatan total belanja daerah, karena semakin besar alokasi untuk belanja pegawai maka semakin besar pula struktur belanja daerah secara keseluruhan.

**Tabel 1. Daftar Belanja Pegawai Periode 201-2025**

| Tahun | Belanja Pegawai (X)  | Total Belanja (Y)    |
|-------|----------------------|----------------------|
| 2016  | Rp 8.958,11          | Rp 24.103,87         |
| 2017  | Rp 8.730,39          | Rp 25.344,36         |
| 2018  | Rp 8.639,23          | Rp 26.052,58         |
| 2019  | Rp 1.431.820.150     | Rp 5.277.064.651     |
| 2020  | Rp 1.567.103.547     | Rp 6.824.777.772     |
| 2021  | Rp 1.608.464.234.033 | Rp 5.508.767.906.133 |
| 2022  | Rp 1.704.120.305.504 | Rp 5.486.764.678.209 |
| 2023  | Rp 1.511,61          | Rp 4.460,91          |
| 2024  | Rp 1.651,36          | Rp 3.983,43          |
| 2025  | Rp 2.607,65          | Rp 4.320,30          |

Selanjutnya pada periode 2023–2025, belanja pegawai kembali menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 belanja pegawai sebesar 1511,61 kemudian meningkat menjadi 1651,36 pada tahun 2024 dan kembali meningkat

menjadi 2607,65 pada tahun 2025. Peningkatan belanja pegawai tersebut juga diikuti oleh perubahan pada total belanja daerah yang berada pada kisaran 3983,43 hingga 4460,91. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan belanja pegawai turut mempengaruhi dinamika total belanja daerah dalam APBD.

**Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif**

| Descriptive Statistics |           |                |    |
|------------------------|-----------|----------------|----|
|                        | Mean      | Std. Deviation | N  |
| Total Belanja          | 1.1008E12 | 2.31743E12     | 10 |
| Belanja Pegawai        | 3.3156E11 | 6.98560E11     | 10 |

**Interpretasi Hasil Analisis Data**

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diketahui bahwa jumlah sampel penelitian sebanyak 10 data (N = 10) yang merupakan data APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2016–2025.

Rata-rata (mean) Total Belanja Daerah sebesar 1.1008E12 dengan standar deviasi 2.31743E12. Nilai ini menunjukkan bahwa secara rata-rata total pengeluaran pemerintah daerah dalam periode penelitian berada pada kisaran tersebut dengan tingkat variasi data yang cukup besar.

Sementara itu, rata-rata (mean) Belanja Pegawai sebesar 3.3156E11 dengan standar deviasi 6.98560E11. Nilai ini menunjukkan bahwa belanja pegawai memiliki kontribusi yang cukup besar dalam struktur belanja daerah.

Besarnya nilai standar deviasi pada kedua variabel menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi atau variasi yang cukup tinggi dalam pengeluaran pemerintah daerah selama periode penelitian. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan anggaran, peningkatan jumlah pegawai, maupun kebutuhan pembangunan daerah yang berubah setiap tahun.

**Tabel 3. Koefisien Regresi**

| Model           | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Correlations |         |      |
|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|--------------|---------|------|
|                 | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Zero-order   | Partial | Part |
| 1 (Constant)    | 1.494E9                     | 3.000E10   |                           | .050   | .961 |              |         |      |
| Belanja Pegawai | 3.315                       | .040       | .999                      | 81.904 | .000 | .999         | .999    | .999 |

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh Belanja Pegawai (X) terhadap Total Belanja Daerah (Y). Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.494E9 + 3.315X$$

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (a) = 1.494E9  
 Nilai konstanta menunjukkan bahwa jika belanja pegawai dianggap konstan atau bernilai nol, maka total belanja daerah diperkirakan sebesar 1.494E9.
2. Koefisien regresi (b) = 3.315  
 Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan belanja pegawai sebesar 1 satuan akan meningkatkan total belanja daerah sebesar 3.315 satuan.  
 Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa hubungan antara belanja pegawai dan total belanja daerah bersifat searah, artinya semakin besar belanja pegawai maka total belanja daerah juga akan semakin meningkat.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 4. Hasil Analisis Model Summary**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics |          |     |     |               |                 |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|-----------------|
|       |                   |          |                   |                            | R Square Change   | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change | Durbin - Watson |
| 1     | .999 <sup>a</sup> | .999     | .999              | 8.48328E10                 | .999              | 6708.284 | 1   | 8   | .000          | 2.988           |

a. Predictors (Constant); Belanja Pegawai

b. Dependent Variable ; Total Belanja

Berdasarkan hasil analisis pada tabel Model Summary, diperoleh nilai:

$$R = 0,999$$

$$R \text{ Square } (R^2) = 0,999$$

Nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,999 berarti bahwa 99,9% variasi Total Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Belanja Pegawai, sedangkan sisanya 0,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian seperti belanja modal, belanja barang dan jasa, serta kebijakan fiskal daerah.

Nilai koefisien determinasi yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap total belanja daerah dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode penelitian.

### Uji t (Uji Parsial)

**Tabel 5. Hasil Uji t**

| Model           | Unstandardized |            | Standardized | t      | Sig. | Correlations |         |            |
|-----------------|----------------|------------|--------------|--------|------|--------------|---------|------------|
|                 | B              | Std. Error | Beta         |        |      | Zero-order   | Partial | Part order |
| (Constant)      | 1.494E9        | 3.000E10   |              | .050   | .961 |              |         |            |
| Belanja Pegawai | 3.315          | .040       | .999         | 81.904 | .000 | .999         | .999    | .999       |

a. Dependent Variable ; Total Belanja

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel belanja pegawai secara parsial berpengaruh signifikan terhadap total belanja daerah. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 81,904 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima.
2. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak.

Karena nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap total belanja daerah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2025. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh terhadap total belanja daerah dapat diterima.

### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap total belanja daerah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2016-2025. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif, yang berarti bahwa peningkatan belanja pegawai akan diikuti oleh peningkatan total belanja daerah. Selain itu, nilai koefisien determinasi yang sangat tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar variasi total belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel belanja pegawai. Hasil uji t juga

menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh terhadap total belanja daerah dapat diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total belanja daerah. Hal ini dapat dipahami karena belanja pegawai merupakan salah satu komponen utama dalam struktur belanja daerah yang harus dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah daerah. Dalam struktur APBD, belanja pegawai termasuk dalam kategori belanja operasi yang bersifat rutin dan wajib dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sebagai belanja yang bersifat wajib, belanja pegawai digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan aparatur pemerintah daerah, seperti pembayaran gaji, tunjangan, serta berbagai hak keuangan lainnya. Oleh karena itu, perubahan dalam belanja pegawai akan secara langsung mempengaruhi besarnya total belanja daerah dalam APBD. Ketika pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja pegawai, maka secara otomatis total belanja daerah juga akan mengalami peningkatan karena belanja pegawai merupakan bagian penting dari komponen belanja daerah.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan pelayanan publik serta bertambahnya jumlah aparatur pemerintah daerah juga dapat mempengaruhi peningkatan alokasi belanja pegawai. Pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan fungsi pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan berbagai program pembangunan daerah. Kondisi ini menyebabkan belanja pegawai menjadi salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah daerah secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitri dan Sasqia Putri (2019) yang menyatakan bahwa belanja pegawai merupakan komponen penting dalam struktur belanja pemerintah daerah dan memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek ekonomi daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja pegawai berperan dalam mendukung operasional pemerintahan meskipun tidak selalu berpengaruh langsung terhadap pembangunan ekonomi.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ema Nur Indah Fitriyani dan Agus Endro Suwarno (2021) yang menunjukkan bahwa belanja pegawai bersama dengan komponen keuangan daerah lainnya berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pegawai memiliki posisi yang strategis dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian Dimas Aditya Putra (2010) juga menemukan bahwa belanja pegawai merupakan salah satu komponen utama dalam struktur pengeluaran pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini memperkuat temuan dalam penelitian ini bahwa belanja pegawai memiliki kontribusi besar dalam menentukan besarnya total belanja daerah.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga perlu dilihat secara kritis karena beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Ruwina Rahmanda dkk. (2025) menemukan bahwa belanja pegawai tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena sebagian besar belanja tersebut bersifat operasional dan tidak langsung berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh belanja pegawai dapat berbeda tergantung pada variabel yang dianalisis dalam penelitian.

Secara teoritis, temuan penelitian ini sejalan dengan teori keuangan publik yang dikemukakan oleh Musgrave yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi negara, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung teori Wagner (Wagner's Law) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pegawai yang baik sangat penting dalam menjaga keseimbangan struktur belanja daerah. Pemerintah daerah perlu memperhatikan proporsi belanja pegawai agar tidak terlalu besar dibandingkan dengan belanja pembangunan yang juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan anggaran yang seimbang antara belanja operasional dan belanja pembangunan akan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh belanja pegawai terhadap total belanja daerah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2025, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa selama periode penelitian tahun 2016-2025, baik belanja pegawai maupun total belanja daerah mengalami variasi dari tahun ke tahun. Rata-rata total belanja daerah sebesar 1.1008E12 dengan standar deviasi 2.31743E12, sedangkan rata-rata belanja pegawai sebesar 3.3156E11 dengan standar deviasi 6.98560E11. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pegawai merupakan salah satu komponen pengeluaran yang cukup besar dalam struktur APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa belanja pegawai memiliki hubungan positif terhadap total belanja daerah. Persamaan regresi yang diperoleh adalah  $Y = 1.494E9 + 3.315X$   
Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan belanja pegawai akan diikuti oleh peningkatan total belanja daerah.
3. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai sebesar 0,999. Hal ini berarti bahwa 99,9% variasi total belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel belanja pegawai, sedangkan sisanya 0,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti belanja barang dan jasa, belanja modal, dan komponen belanja lainnya dalam APBD.
4. Hasil uji t (uji parsial) menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 81,904 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap total belanja daerah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2025.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya total belanja daerah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## REFERENSI

- Aditya Putra, D. (2010). *Analisis Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah*.
- Ayu, M. (2020). Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: BPS.

- Fitri, N., & Putri, S. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kawasan Barat Indonesia.
- Fitriyani, E. N. I., & Suwarno, A. E. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Jakarta: Kemendagri.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance*. New York: McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Rahmanda, R., Andini, R., Sitepu, C. R. A. B., Malau, V. M. T., & Banjarnahor, A. T. N. (2025). *Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi*.